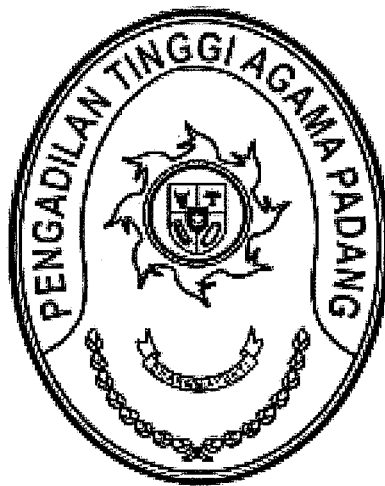


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PENGAWASAN RUTIN/REGULER PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

NOMOR ST : W3-A/2930/PS.00/XI/2022

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022



OLEH

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah mempunyai dampak terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat haruslah selalu dipantau dan dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala. Sejauhmana dinamika implementasi visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta capaian program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama yang telah dilakukan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana/Program yang telah disusun dan ditetapkan.

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung;

11. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2591/PS.00/9/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2022;
12. Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2930/PS.00/XI/2022 tanggal 3 NOVEMBER 2022

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap semua objek pemeriksaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi dalam pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang dituangkan dalam LHP telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam LHP yang belum dilaksanakan;
3. Memonitor tindakan koreksi yang telah dilakukan serta pengaruhnya terhadap kinerja;
4. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh pada pengawasan yang lalu tidak terulang lagi

D. Metodologi Pengawasan

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Visitasi (pemeriksaan lapangan, cek dokumen/fisik)

E. Jangka Waktu Pengawasan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi selama 2 (dua) hari, tanggal 9 s.d. 10 November 2022 di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Drs. H. Syafri Amrul M.H.I., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. H. Damris S.H., Panitera Muda Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. Aidil Akbar S.E., Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

BAB II

HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Manajemen Peradilan

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: - Surat Keputusan Pengadilan Agama Payakumbuh tentang hakim pengawas bidang telah diterbitkan tanggal 22 Februari 2022 pengawasan oleh hawasbid telah dilaksanakan sampai bulan April 2022. Akan tetapi tindak lanjut dari laporan hawasbid belum seluruhnya tuntas. Rekomendasi: - Agar ditindak lanjuti secepatnya.	- Temuan Hawasbid Pengadilan Agama Payakumbuh sudah ditindaklanjuti oleh pejabat terkait	Benar
2	Kondisi: - Pimpinan belum melaksanakan pemeriksaan Buku Induk Keuangan secara mendadak. Rekomendasi: - Agar dilaksanakan sesuai acuan dalam buku II tersebut.	- Sudah ditindaklanjuti dengan memeriksa buku induk keuangan perkara	Benar
3	Kondisi: - Pimpinan belum mengeksaminasi putusan hakim.	- Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan eksaminasi putusan hakim dengan melibatkan tenaga	Tindak lanjut atas temuan ini keliru. Yang dimaksud temuan tersebut, pimpinan belum melaksanakan eksaminasi terhadap putusan (berkas perkara) yang

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: - Agar ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan.	teknis yaitu Hakim, Panitia Pengganti dan Jurusita	ditangani hakim, utk menilai kemampuan hakim, eksaminasi tersebut dilakukan secara bertingkat, putusan hakim oleh pimpinan, putusan pimpinan oleh PTA, hakim PTA oleh pimpinan PTA, putusan pimpinan PTA oleh Mahkamah Agung.

B. Administrasi Perkara

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: - Masih ada Panitia Pengganti yang menginput data BAS kedalam SIPP ditemui pada perkara [1] 230/Pdt.G/2022/PA. Pyk, yang diputus tanggal 18-5-2022 [2] 240/Pdt.G/2022/PA. Pyk, yang diputus tanggal 18-5-2022 [3] 144/Pdt.G/2022/PA. Pyk yang diputus tanggal 18-5-2022 [4] 204/Pdt.G/2022/PA. Pyk yang diputus tanggal 18-5-2022 Rekomendasi: - Panitia Pengganti harus segera menginput dan mengupload data BAS yang telah selesai sidang kedalam SIPP, Panitia harus sering memonitoring kelengkapan BAS yang telah	- Sudah dilakukan penginputan data pada aplikasi SIPP yaitu BAS perkara nomor 1. 230/Pdt.G/2022/PA.Pyk 2. 240/Pdt.G/2022/PA.Pyk 3. 144/Pdt.G/2022/PA.Pyk 4. 204/Pdt.G/2022/PA.Pyk	Sesuai dengan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh PA Payakumbuh dan telah dicek melalui SIPP. Temuan telah dilaksanakan dan diperbaiki sebagaimana mestinya dan setelah evaluasi masih ada Panitia Pengganti yang belum menginput BAS dalam SIPP yaitu perkara No 599 yaitu BAS tanggal 26-10-2022

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	disidangkan apakah Panitera Pengganti sudah menginput dan mengupload BAS kedalam SIPP		
2	Kondisi: - Sisa panjar masih ada yang belum dikembalikan kepada pihak, yaitu pada perkara nomor18/Pdt.G/2022/PA.Pyk, 25/Pdt.G/2022/PA.Pyk dan 480/Pdt.G/2022/PA.Pyk Rekomendasi: - Panitera harus segera memberitahukan kepada pihak, agar mengambil kelebihan panjar biaya perkara, dan dapat juga dilakukan dengan mengirim surat kepada pihak untuk mengambil sisa panjar biaya perkara;	Telah dibuat surat keterangan atas nama Panitera, bahwasanya telah dilakukan pemanggilan dan penginformasian terkait sisa panjar perkara terhadap para pihak dengan nomor perkara tersebut	Kondisi saat money berdasarkan penelurusan dalam SIPP keuangan perkara, sisa panjar telah nol dan hasil tindak lanjutnya yang dibuat oleh Panitera seharusnya setelah 6 bulan perkara putus dan sisa panjar belum juga diambil maka Panitera harus membuat surat pemberitahuan kepada para pihak
3	Kondisi: Masih ada 4 buah perkara yang belum masuk ke ruang arsip, perkara tersebut telah ditunda untuk mengucapkan ikrar talak 6 bulan. Perkara tersebut terdiri dari : 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk. Ruang arsip sudah bagus dan rapi, Fisik Berkas pada Ruang Arsip	Telah dimasukkan ke dalam arsip 4 buah perkara yang belum masuk ke ruang arsip, perkara tersebut telah ditunda untuk mengucapkan ikrar talak 6 bulan. Perkara tersebut terdiri dari : 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 227/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 205/Pdt.G/2021/PA.Pyk, 357/Pdt.G/2021/PA.Pyk. Perkara	Berkas yang ditemukan dalam LHP telah ditindak lanjuti dengan melihat arsip perkara dan berkas yang dimaksud telah ada dalam brankas arsip PA Payakumbuh

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	sudah rapi dan setiap perkara putus yang telah BHT telah disusun rapi dalam ruang Arsip perkara Rekomendasi: - Agar panitera muda gugatan mengontrol terhadap perkara ikrar talak yang belum terlaksana yang ditunda 6 bulan - Agar Panitera memonitoring perkara yang sedang berjalan terhadap perkara ikrar talak yang belum terlaksana dan ditunda 6 bulan	tersebut juga telah dilengkapi dengan SK panitera dan Penetapan Ketua P.A. Pyakumbuh terkait penundaan dan lewat waktu ikrar talaknya	
4	Kondisi: - Masih banyak Akta Cerai yang belum diambil pihak berperkara, sesuai keadaan per Januari 2022 – 23 Mei 2022 sebagai berikut : 1. Belum diambil Akta Cerai Untuk Penggugat/Pemohon sebanyak = 11 buah Akta Cerai 2. Akta Cerai Untuk Tergugat/Terohon sebanyak = 140 buah Akta Cerai Rekomendasi: - Panitera membuat surat pemberitahuan kepada Para Pihak untuk mengambil Akta Cerai yang telah diterbitkan melalui pos - Panitera bersama Tim IT segera menciptakan dan membuat berupa inovasi untuk pemberian akta cerai tanpa menghilangkan PNBP	- Telah dibuat surat keterangan atas nama Panitera, bahwasanya telah dilakukan pemanggilan dan penginformasian terkait akta cerai terhadap para pihak dengan nomor perkara tersebut	Keadaan sampai saat monev dilaksanakan masih ada akta cerai yang belum diambil atau diserahkan pihak pengadilan kepada para pihak dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengadilan hanya berbentuk surat keterangan bukan pemberitahuan secara langsung kepada pihak-pihak

C. Administrasi Persidangan

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: - Pada perkara No.437/Pdt.G/PA.Pyk, didalam posita surat gugatan dimuat bahwa pemohon telah menjatuhkan talak pada termohon, sedangkan dalam petitum ybs memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak. Rekomendasi: - Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar meja 1, sewaktu menerima perkara memberitahu kepada para pihak posita tentang cerai diluar sidang tidak mendukung petitum.	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Benar
2	Kondisi: - Didalam PHS Pihak Tergugat/Termohon sudah diperintahkan/dibolehkan mengajukan jawaban dan bukti-bukti pada sidang pertama. Rekomendasi: - Agar disesuaikan konsideran PHS dengan perkara yang akan disidangkan.	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Benar
3	Kondisi:	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Benar

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	- Pada perkara No.437/Pdt.G/PA.Pyk halaman 43 dan pada perkara No.139/Pdt.G/2022/PA.Pyk halaman 5,7,11,16, 17,22,25,28 dst...dst.... juga Pada perkara No.109/Pdt.g/PA.Pyk coret zig-zag kosong tanpa ada sah coret dan diparaf. Rekomendasi: - Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.		
4	Kondisi: - Pada perkara No.109/Pdt.g/PA.Pyk kalimat “pembukaan” yang diajukan pihak dalam jawaban rekonsensi/replik secara tertulis belum dicoret. Rekomendasi: - Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Benar
5	Kondisi: - Didalam perkara No.109/Pdt.G/2022 terjadi penggantian Majelis Hakim, didalam, konsideran PMH tgl 23 Februari 2022 membaca PMH tanggal 23 Februari 2022; Rekomendasi:	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Benar

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	- Agar diperhatikan pembuatan PMH yang baru jika terjadi penggantian majelis dan memuat keterangan majelis yg baru mengambil alih pemeriksaan majelis yang lama kalau perkara sudah diperiksa.		
6	Kondisi: - Perkara perkara No.109/Pdt.G/2022 pernyataan para pihak tentang pemilihan mediator diserahkan kepada majelis, namun didalam konsideran penetapan mediator didasarkan pada kesepakatan para pihak memilih mediator. Perkara perkara No.437/Pdt.G/2021 didalam BAS tertulis para pihak menandatangani penjelasan mediasi namun dalam pernyataan tanda tangan masih kosong. Rekomendasi: - Berita acara sidang adalah dukumen resmi Negara, diminta agar pembuatan berita acara sidang dilakukan secara hati-hati sesuai dengan ketentuan.	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden.	Benar
7	Kondisi: - Bukti surat dalam perkara No.437/Pdt.G/2021 tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh ketua majelis.	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Benar

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: - Agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan		
8	Kondisi: - Dalam perkara No.139/Pdt.G/2022/PA.Pyk hak hadanah sudah ditetapkan namun nafkah anak belum ditetapkan/ ditambahan termasuk kenaikan nafkah pertahun. Rekomendasi: - Agar diterapkan pada perkara lainnya	- Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik	Benar
9	Kondisi: - Didalam salah satu amar putusan tertera “.....menolak untuk selain dan selebihnya....” namun tidak dijumpai dalam pertimbangan hukum hal-kal apa saja yang ditolak itu. Rekomendasi: - Agar majelis dalam membuat amar putusan menggunakan kalimat secara jelas,tegas, tidak bias dan tidak multi tafsir.	- Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik	Benar
10	Kondisi: - Mediasi dengan mediator dilakukan 2 kali dan laporan yang kedua (mediasi secara sukarela) juga tidak berhasil.	- Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik	Benar

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: - Jika mediasi sukarela juga tidak berhasil tidak perlu dimuat ulang dalam BAS.		
11	Kondisi: - Pernyataan ketua majelis pada bukti surat “telah dicocokkan dengan aslinya” dimuat pakai stempel. Rekomendasi: - Agar dimasukkan dalam DIM untuk dibahas pada rakor PTA padang.	- Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik	Benar
12	Kondisi: - Bukti surat tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diparaf oleh ketua majelis. Rekomendasi: - Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan.	- Tidak memerlukan perbaikan, sehingga tidak ada eviden. Cukup dikemudian hari akan dilakukan perbaikan dan perubahan lebih baik	Benar
13	Kondisi: - Dalam BAS perkara No.32/Pdt.P/2022/PA.Pyk halaman 1 tertera Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap. Dalam perkara ini tidak ada Pemohon II. - Dalam perkara ini juga tidak ada pembacaan surat permohonan. - Pada halaman 6 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bapak kandung dari calon isteri, sedangkan perkara	- Telah dilakukan perbaikan di dalam BAS perkara tersebut dalam halaman 1, 6 dan putusan halaman 3, sebagaimana terlampir eviden.	Benar

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	diajukan oleh bapak kandung calon isteri. - Dalam putusan hal 3 tertera majelis hakim, sementara perkara dengan hakim tunggal. - Majelis menasehati Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak ada dalam BAS. - Penetapan belum dikoreksi sehingga tidak sejalan dan tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam BAS. - BAS dengan Penetapan berjalan sendiri-sendiri. Rekomendasi: - Agar pembuatan berita acara sidang dan Penetapan/putusan ditulis sesuai dengan ketentuan.		
14	Kondisi: - BAS perkara E Court pada sidang terakhir putusan/penetapan tidak dibacakan sementara dalam putusan termuat :...putusan/penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui..... dst. Rekomendasi: - Agar pembuatan berita acara sidang ditulis sesuai dengan ketentuan dan memuat amar putusannya. -	- Telah dilakukan perbaikan di dalam BAS perkara tersebut, sebagaimana terlampir eviden	Benar

D. Administrasi Umum

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: - Program kerja yang dibuat belum terlihat monevnya pada notulen rapat atau pun pembahasan rapat tanggal 18 Mei dan 4 Februari 2022 Rekomendasi: - Dilakukan monev Program Kerja baik melalui rapat maupun laporan yang kemudian direkap dalam satu kesatuan dokumen monitoring dan evaluasi program kerja bulan terkait. Dokumen monev mencakup seluruh poin pada program kerja bulan terkait yang harus dicapai	- Sudah dilaksanakan Monev Program Kerja Triwulan I	Tidak terlihat periode pada dokumen monev (misal triwulan I)
2	Kondisi: - Isi Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah berupa dokumen LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022 baik DIPA 01 maupun DIPA 04. Neraca keuangan bulan April belum ada baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 04. Daftar aset dan inventaris pada web tidak ada. Informasi pengadaan barang/ jasa sudah diupload berupa dokumen Rekap RUP. Pada dokumen rekap RUP tercantum pada poin 2 Paket Pos Bantuan Hukum, pemilihan penyediaanya dilakukan melalui penunjukan langsung	- a. LRA DIPA 01 dan DIPA 04 telah dirobah dengan mengambil data dari OMSPAN. b. Neraca Keuangan belum bisa diupload di website karena data belum bisa diambil menunggu migrasi data pada aplikasi SAKTI, sebelumnya data diambil dari aplikasi e-rekon sementara tahun 2022 data keuangan migrasi ke SAKTI sehingga masih menunggu data pada aplikasi SAKTI c. Daftar Aset dan Inventaris pada website sudah	Untuk paket pengadaan pada RUP poin 2 (pos bantuan hukum) masih tertulis metode pemilihan penyediaanya dilakukan melalui penunjukan langsung

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Rekomendasi: - Merubah judul laporan menjadi Laporan Realisasi Anggaran. Membuat Neraca keuangan bulan April baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 04 kemudian menguploadnya pada website PA Payakumbuh. Mengganti Laporan Kondisi Barang pada web dengan Laporan Barang Kuasa Pengguna. Untuk paket pengadaan pada RUP poin 2 dengan dana yang dimiliki PA Payakumbuh, metode pemilihan penyediannya dilakukan melalui pengadaan langsung	diupload dengan mengambil data Laporan Barang Kuasa Pengguna	
3	Kondisi: - Terdapat 6 lokasi baik hadir maupun pulang pada presensi online SIKEP tanggal 23 Mei 2022 tidak berada pada sekitaran lokasi kantor PA Payakumbuh. Terdapat pegawai yang tidak melakukan presensi pulang pada SIKEP pada tanggal tersebut. Submenu ketidakhadiran pada menu lain-lain pada SIKEP belum pernah diinput Rekomendasi: - Pimpinan melakukan sosialisasi tentang peraturan terkait presensi SIKEP. Dilakukan reset lokasi pada hp sesuai panduan pada aplikasi SIKEP. Melakukan input ketidakhadiran pegawai pada submenu ketidakhadiran pada menu lain-lain pada SIKEP oleh Pengelola Kepegawaian (Kasubbag Kepegawaian dan	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Sudah ditindaklanjuti

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	Ortala) untuk kemudian dilakukan validasi oleh Sekretaris		
4	Kondisi: - Pada konsideran menimbang pada SK Baperjaktat mengacu kepada KMA nomor 350 tahun 1998 Rekomendasi: - Membuat SK Tim Baperjaktat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Perubahan SK Baperjaktat tidak menggunakan mekanisme revisi SK. Untuk mekanisme perubahan, mestinya dibuat SK perubahan dengan nomor baru
5	Kondisi: - Laporan kinerja pegawai bulan April 2022 belum tandatangani oleh atasan langsung sebanyak 4 pegawai (Emmy, Oktariyadi, Harmen, Amelia), dan belum ada laporan sebanyak 3 pegawai (Aliya, Rani, Tiara) Rekomendasi: - Pegawai yang belum menyerahkan dan PKPnya belum ditandatangani atasan, agar mencetak dan memberikan kepada atasannya untuk kemudian diserahkan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Telah ditindaklanjuti

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
6	Kondisi: - SOP belum dilakukan reviu Rekomendasi: - Lakukan reviu dan update seluruh SOP berkaitan dengan perubahan proses atau alur sesuai dengan kondisi terkini ataupun perubahan lainnya, didahului dengan pembuatan SK Reviu SOP yang menuangkan struktur, uraian tugas, jadwal	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Dokumen reviu belum ada. Belum ada eviden tindaklanjut dari SK Pembentukan Tim Penyusun dan Reviu SOP.
7	Kondisi: - SK Pengelola Keuangan nomor W3-A5/21/KU.01/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tidak terdapat uraian tugas tim, tidak memiliki lampiran daftar honor tim pengelola. Pada lampirannya yang ada, tidak ada pengusasan untuk PPABP. Bendahara Penerimaan belum ada sertifikat. Terdapat 1 pelaksanaan SAKTI tidak ada namanya pada SK pengelola keuangan, yaitu Rani Anggaraini, S.Kom dengan jabatan admin Rekomendasi: - Menyempurnakan SK Pengelola Keuangan dengan membuat uraian tugas masing-masing personil, membuat lampiran daftar honor tim pengelola. Membuat pengusasan untuk PPABP pada satu SK dan menghapus SK nomor W3-A5/24/KU.01.1/1/2022,	- Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	Rekomendasi sudah ditindaklanjuti dan sertifikat bendahara telah ada. Namun tandatangan (pengesahan) pada daftar penerima honor berdiri sendiri pada halaman baru

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	atau menghapus konsideran menimbang untuk PPABP dan SK nomor W3-A5/24/KU.01.1/1/2022 tetap ada. Menjaga kerja agar tetap kondusif dengan kerja sama antara Kasubag Umum dan Keuangan dengan Kasubag Kepegawaian dan Ortala serta dipantau oleh Sekretaris. Lakukan pemantauan terhadap penerbitan sertifikat bendahara penerimaan yang sudah mengikuti tes. Menghapus Rani Anggaraini, S.Kom dengan jabatan admin pada SK SAKTI atau mencantumkannya pada SK pengelola keuangan		
8	Kondisi: - Laporan Keuangan Semester 1 dan Tahunan beserta data dukung belum diijlilid. LPJ Bendahara tahun 2022 setiap bulan tidak bertanggal, tidak ada bukti pemeriksaan dari KPPN, pengiriman dilakukan via Whatsapp ke petugas vera KPPN Bukittinggi Rekomendasi: - Lakukan cetak dan jilid rapi Laporan Keuangan baik Semester I maupun Tahunan beserta data dukungnya serta distribusikan kepada stakeholder. Buat LPJ sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan minta tanda pemeriksaan dari KPPN	- Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	Laporan Keuangan Semester 1 dan Tahunan 2021 beserta data dukungnya untuk DIP A 04 belum diijlilid. LPJ Bendahara Pengeluaran tahun 2022 bulan Juni dan Juli tidak bertanggal, penerimaan dan verifikasi dari KPPN untuk 2 bulan tersebut bertanggal 22 Agustus 2022

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
9	Kondisi: - Aplikasi E-Bima tahun 2022 belum diisi, monitoring kuitansi UP tahun 2021 belum diisi lengkap Rekomendasi: - Lakukan pengisian Aplikasi E-Bima tahun 2022 dan tahun 2021 secara lengkap sebagaimana huruf A pada surat SEKMA Nomor 1723/SEK/KU.01/8/2021 sebanyak 5 poin	- Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	Pengisian hingga bulan September 2022 sudah dilakukan
10	Kondisi: - Terdapat lemari kayu pada DBR ruangan kesekretariatan (Kode ruangan 5), namun sudah pindah ke ruang arsip. Terdapat kursi 16 unit pada ruang rapat (kode ruangan 26) dan TV, sementara ada DBR terdapat 26 unit dan tidak ada TV. DBR tertanggal 17 Januari 2022. PSP telah dilaksanakan untuk 375 aset peralatan mesin, terdiri dari 221 item pada tahun 2016 dan 154 item pada tahun 2021, kemudian terdapat input penghapusan tahun 2018 pada aplikasi SIMAK BMN sebanyak 60 item, sedangkan jumlah peralatan dan mesin sekarang 295 item, sehingga terdapat 20 aset peralatan dan mesin yang belum dilakukan PSP. Kondisi Barang belum sesuai dalam aplikasi dan terdapat 1 BMN Rusak Berat yang belum diajukan penghapusannya yaitu LCD Projector/ Infocus (3.05.01.05.048). Terdapat 10	- Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir. penginputan persediaan tahun 2022 masih belum ada aplikasi untuk melakukan penginputan data persediaan pada modul sakti persediaan.	1. Belum terlihat rencana kerja pemutakhiran DBR setiap 3 bulan. Rencana kerja ini dapat dituangkan dalam SK KPA 2. Belum terlihat dokumen pengusulan barang rusak berat untuk dihapuskan. 3. Tidak ada rekap dan monitoring penanggunganjawab laptop, notebook dan kendaraan 4. DBR dengan kode ruangan 26 belum dimutakhirkan

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	SK penggunaan laptop dan notebook sedangkan aset laptop dan notebook berjumlah 15 unit, dan tidak terdapat dokumen yang menyatakan 5 unit lainnya dalam kondisi rusak.Terdapat 2 mobil dan 4 sepeda motor yang sudah ada SK penangungjawabnya, sedangkan jumlah sepeda motor ada 5 unit.Kwitansi pembelian belanja barang persediaan (DIPA 01) belum diinput ke aplikasi persediaanStock opname ATK Perkara pembebasan biaya perkara dilakukan per semester Rekomendasi: - Susun rencana kerja pemutakhiran DBR setiap 3 bulan dan pedomani SE Kepala BUA nomor 2 tahun 2017. Buat monitoring PSP BMN dan usulkan PSP untuk paling lambat 6 bulan setelah diperoleh.Lakukan update kondisi barang pada aplikasi BMN. Ajukan pengusulan barang rusak berat untuk dihapuskan.Buat rekap dan monitoring penangungjawab laptop, notebook dan kendaraan sehingga bisa digunakan juga untuk monitoring pemeliharaan aset. Usulkan kendaraan yang rusak berat untuk dihapuskan setelah dimutakhirkan kondisinya pada aplikasi BMN. Terus update informasi terkait aplikasi SAKTI modul persediaan. Lakukan input belanja setelah aplikasi dapat digunakanLakukan stock opname ATK Perkara		

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	pembebasan biaya perkara (DIPA 04) 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris dan Panitia		
11	Kondisi: - Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja PPNNP belum dilakukan untuk tahun 2022 Rekomendasi: - Lakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja PPNNP segera karena triwulan pertama sudah lewat	- Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	Tidak terlihat eviden Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja PPNNP tahun 2022 untuk setiap PPNNP
12	Kondisi: - Sudah terdapat aplikasi SLIMS Perpustakaan PA Payakumbuh dengan link https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-payakumbuhxy/index.php namun belum semua buku diisi keaplikasi tersebut Rekomendasi: - Buat tim untuk menginput ke aplikasi SLIMS, dibuat pebagian tugasnya, targetnya dan dimoney	- Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	Aplikasi SLIMS Perpustakaan PA Payakumbuh sudah dapat diakses
13	Kondisi: - SK PPNNP sudah dibuat secara Perorangan namun belum dibuat kolektif. PPNNP belum dilakukan Evaluasi per 3 bulan. Dokumen Seleksi PPNNP di	- Sudah dilakukan perbaikan untuk SK PPNNP sebagaimana eviden terlampir	Evaluasi PPNNP per 3 bulan belum dilakukan

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	awal tahun tidak ada hasil rapat dan hasil tindak lanjut evaluasi akhir tahun PPNPN Rekomendasi: - Buat SK PPNPN format kolektif sesuai dengan format aturan terbaru begitu juga dengan format perorangan Lakukan Evaluasi PPNPN per 3 bulan dan sesuaikan Format Evaluasi dengan format aturan terbaru Dokumentasikan seleksi PPNPN dengan BA hasil rapat dan hasil tindak lanjut evaluasi akhir tahun jadikan monitoring absen dan berkas cuti PPNPN sebagai acuan penilaian per tiga bulan PPNPN		
14	Kondisi: - SKP dan PKP pegawai PA Payakumbuh tahun sekarang dan tahun sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik dan rapi Rekomendasi: - Agar pimpinan membuat prosedur penyerahan dokumen SKP dan PKP dari pegawai, atasan langsung hingga penyerahan kepada Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	- Telah dilakukan perbaikan, sebagaimana terlampir dalam eviden	Rekomendasi belum dilaksanakan
15	Kondisi: - Dokumen pertanggungjawaban keuangan GU 9 belum tersusun rapi dan lengkap (SPM nomor	- Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana eviden terlampir	Bendahara Penerimaan belum melakukan pencatatan menggunakan aplikasi SAKTI

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	00055A). Pada dokumen ini belum lengkap ditulis nama penerima uang dan tanggal penerimaannya serta stempel pada pejabat terkait.KPA belum melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran DIPA 01 dan belum menandatangani BP PajakBendahara Penerimaan belum melakukan pencatatan menggunakan aplikasi SAKTI Rekomendasi: - Rapihan dan lengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan, baik GU maupun LS. Buat nama penerima uang dan tanggal penerimaannya serta stempel pada pejabat terkait. Agar KPA melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran DIPA 01 dan menandatangani BP Pajak jika sudah benar, jika salah agar meminta untuk diperbaiki. Agar pencatatan pembukuan bendahara penerimaan menggunakan aplikasi SAKTI		
16	Kondisi: - Untuk pengadaan jasa konsultan Posbakum tahun 2022, KAK diandatangani Panitera, Tidak ada rancangan kontrak, Penyusunan HPS tidak berdasarkan billingrate Inkindo, Dokumen pelaksanaan kegiatan tidak dijadikan satu kesatuan, Tidak ada menilai kinerja Penyedia, Tidak ada penetapan menetapkan tim pendukung, Tidak ada	- Sudah dilakukan perbaikan pada dokumen kontrak Posbakum, untuk selanjutnya pengadaan barang dan jasa PPK berpedoman pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021	Tindaklanjut tidak sesuai dengan rekomendasi. Jika terdapat perubahan kontrak, harus dilakukan melalui mekanisme addendum. Kontrak yang diupload tidak bernomor

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
	penetapan tim pendukung, Tidak ditemukan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Rekomendasi: - Agar PPK memahami pengadaan barang/ jasa pemerintah berdasarkan Perpres, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia serta Keputusan Depui Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah		
17	Kondisi: - Untuk pengadaan jasa konsultan Posbakum tahun 2022 tidak ada BA evaluasi kualifikasi, Pengumuman pengadaan, Pemberian Penjelasan dan dokumen Penetapan pengadaan berisi penetapan Pemenang Rekomendasi: - Agar PPK memeriksa laporan hasil pengadaan dari pejabat pengadaan ataupun pokja pemilihan jika terdapat tender/ seleksi dimana pada laporannya terdapat BA evaluasi kualifikasi, Pengumuman pengadaan, BA Pemberian Penjelasan dan Penetapan Pemenang serta Pengumuman Pemenang	- Sudah dilakukan perbaikan pada dokumen kontrak Posbakum	1. Terdapat BA Pembukaan Penawaran yang ditandatangani Pejabat Pengadaan bersama penyedia 2. Tidak ada BA evaluasi kualifikasi, 3. Pada dokumen Pengumuman pengadaan tersirat bahwa belum dilakukan evaluasi kualifikasi, namun pemenang sudah ditetapkan

E. Kinerja Pelayanan Publik

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TINDAK LANJUT	HASIL EVALUASI
1	Kondisi: - Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Tidak ada petunjuk jadwal jam kerja yang dapat dilihat para pihak. Rekomendasi: - Agar Panitia dan petugas yang bertanggung jawab di PTSP segera membuat jadwal jam kerja yang diletakkan pada ruang PTSP.	- Sudah ditindaklanjuti dengan membuat banner jam pelayanan dan meletakkannya di ruang PTSP	Sudah ditindaklanjuti
2	Kondisi: - Dekorasi ruang sidang I - Tidak ada sekat pembatas antara para pihak dan pengujung, - bangku untuk pengujung tidak ada. - Seperangkat bendera merah putih dan bendera MA tidak ada - Lambang burung garuda tidak ada - Seperangkat sound system tidak ada - Mushaf Al Quran tidak ada - Tidak ada daftar mediator di depan pintu ruang sidang - Tidak ada Alarm - Tidak ada satu unit teleconference Rekomendasi: - Agar dilengkapi	- Sudah ditindaklanjuti sesuai standarisasi ruang sidang	1. Seperangkat sound system belum terpasang 2. unit teleconference belum terpasang

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap temuan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh telah melakukan menindaklanjuti setiap uraian hasil pemeriksaan, namun tindak lanjut pada beberapa temuan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terdapat 1 temuan bidang administrasi umum belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Dua temuan telah dilaksanakan dan 14 temuan telah ditindaklanjuti namun belum sempurna.

B. Saran

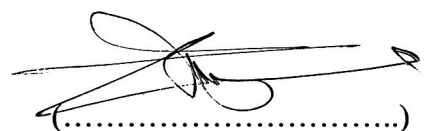
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan kepada pimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh agar:

1. Menjaga konsistensi terhadap perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan terhadap temuan pemeriksaan dan;
2. Melaksanakan evaluasi kembali terhadap tindak lanjut temuan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya berdasarkan catatan yang tercantum pada kolom hasil evaluasi pada Bab II dan yang telah diekspos pada penutupan kegiatan monitoring dan evaluasi.
3. Melakukan tindaklanjut terhadap 1 temuan bidang administrasi umum sesuai rekomendasi.
4. Menyempurnakan tindaklanjut terhadap 14 temuan bidang administrasi umum.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pengawasan rutin/reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Padang, 10 November 2022
Tim Monitoring dan Evaluasi

1. Drs. H. Syafri Amrul M.H.I.



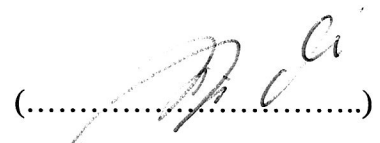
(.....)

2. H. Damris S.H.



(.....)

3. Aidil Akbar S.E.



(.....)